

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PROTOFOLIO

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 10

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Arnesta Az Zahra | 2313031066 |
| 2. Aulia Dzidni Nafissa | 2313031073 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

A. ARTIKEL

I. ARTIKEL 1

Nama Artikel : Jurnal Artikel Akutansi dan Pendidikan
Judul : Perkembangan Penelitian Akutansi Sektor Publik Di
Indonesia
Nama Penulis : Harumi Puspa Rizky & Doddy Setiawan
Halaman : 94-116
Volume/No/ Tahun Terbit : Vol.8/No.2/Okttober 2019
e-ISSN : 2477-4995

Pendahuluan

Dalam pendahuluannya, penulis menjelaskan bahwa akutansi sektor publik sering mengalami perubahan dari sistem tradisional hingga New Public Management (NPM). Hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai otonomi daerah di mana daerah diberi wewenang untuk menjalankan dan mengurus urusan pemerintah serta pelayanan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Beberapa tahun belakangan ini penelitian mengenai akuntansi sektor publik mulai menarik perhatian banyak pihak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penelitian di sektor publik pada jurnal-jurnal terakreditasi di Indonesia. Penelitian mengenai akuntansi sektor publik telah banyak diteliti di Indonesia maupun di Luar negeri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode “charting the field” yang dikembangkan oleh Hesford et al. (2007). Pada penelitian ini, peneliti memilih beberapa hasil penelitian mengenai akuntansi sektor publik yang diterbitkan di 22 jurnal terakreditasi per Maret 2019, kemudian mengidentifikasi berdasarkan topik dan metode. Jurnal yang terpilih merupakan jurnal terakreditasi pada sinta 2 per Maret tahun 2019 dengan kata kunci akuntansi, bisnis, dan business.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis 137 artikel yang membahas mengenai akuntansi sektor publik dan diterbitkan pada 22 jurnal terakreditasi di Indonesia

dan diklasifikasikan berdasarkan topik dan metode selama 9 tahun mulai tahun 2010-2018. Mayoritas penelitian mengenai akuntansi sektor publik ini diterbitkan di Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). Topik yang paling banyak dibahas pada penelitian akuntansi sektor publik pada 22 jurnal terakreditasi adalah topik mengenai akuntansi keuangan yaitu pengungkapan laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan flypaper effect. Sementara itu topik yang masih jarang diteliti adalah sistem akuntansi sektor publik dan perpajakan. Pada 22 jurnal yang diteliti selama tahun 2010-2018 metode penelitian yang paling sering digunakan adalah kuantitatif dengan persentase 70% sementara metode kualitatif sebesar 28%. Metode yang paling sering digunakan adalah survei dan archival yang mempunyai persentase masing-masing 34% dan 32%. Pada penelitian ini diketahui bahwa eksperimen masih sangat jarang digunakan oleh peneliti, oleh karena itu ini hal ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode eksperimen.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil yang dijelaskan bahwa dari tabel-tabel yang telah ditampilkan pada pembahasan, diketahui bahwa masih banyak topik dalam akuntansi sektor publik yang masih jarang diteliti, padahal topik tersebut dapat menjadi hal yang menarik.

Kelebihan dan Kekurangan

Informasi yang disampaikan penulis dalam artikel ini sudah dijelaskan secara mendetail sehingga pembaca lebih paham terkait permasalahan pada penelitian ini. Namun, peneliti tidak menyampaikan tujuan dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Rizky, Harumi Puspa, & Doddy Setiawan. 2019. Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 8 (2), hlm 94-116.

II. ARTIKEL 2

Nama Artikel	: Artikel Jurnal Akutansi STIE MDP
Judul	: Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akutansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov)
Nama Penulis	: Intan Permata Haska Wina & Siti Khairani
Halaman	: 1-15
Tahun Terbit	: 2017

Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan bahwa setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Good Governance. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kausal atau pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Nonprobability sampling.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari tabel uji parsial diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki nilai thitung > ttabel ($2,326 > 2,037$) dan signifikansi < 0,05 ($0,027 < 0,05$) Maka H_0 ditolak, artinya Standar Pelaporan Akutansi Sektor Publik secara Parsial berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan, variabel X2 memiliki nilai thitung > t tabel ($4,946$

$> 2,037$) dan signifikansi $<0,05$ ($0,000 < 0,05$) Maka H_0 ditolak, artinya Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh secara Parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan berdasarkan tabel 6 hasil uji simultan menunjukkan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan apabila kinerja akuntabilitas instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Kelebihan dan Kekurangan

Dalam artikel ini peneliti telah menjelaskan materi dengan singkat, jelas serta menyampaikan table hasil perhitungan. Namun, terdapat kekurangan yaitu tidak menyampaikan bagian tujuan si peneliti dalam meneliti permasalahan ini.

Daftar Pustaka

Wina, Indah Permata, & Siti Khairani. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE MDP*, hal 1-15

III. ARTIKEL 3

Nama Artikel : Artikel Jurnal Artikel Universitas Negeri Padang
Judul : Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi
Nama Penulis : Husnul Mubaraq
Halaman : 1-19
Tahun Terbit : 2017

Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keadaan tersebut menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi ANALISIS ARTIKEL dan pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif atau tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dengan dua variabel atau lebih. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode angket atau menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner).

Hasil dan Pembahasan

1. Terdapat pengaruh antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang $t_{hitung} 4,895 > t_{tabel} 2,007$ dan nilai sig perhitungan $0,000 < 0,05$.
2. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa koefisien β pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif sebesar 0,180 dan nilai signifikansi $0,169 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.
3. Kompetensi aparatur pemerintah bernilai sebesar 0,390 dan nilai signifikansi $0,028 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh, dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif.

Kelebihan dan Kekurangan

Dalam artikel pendahuluan dan pembahasan dijelaskan secara rinci serta lengkap. Sebaiknya peneliti menambahkan abstrak di bagian awal yang tujuannya untuk memudahkan pembaca terkait gambaran artikel ini.

Daftar Pustaka

Mubaraq, Husnul. 2017. Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi. Universitas Negeri Padang, hlm 1 - 19.

B. JURNAL NASIONAL

I. JURNAL NASIONAL 1

Nama Jurnal : Jurnal Inovasi Global

Judul Jurnal : Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Penulis : Sudrajat Martadinata

Halaman : 5 halaman

Tahun Terbit : 2024

Tempat : Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Link Jurnal : <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index>

Tujuan Penelitian

Jurnal ini bertujuan untuk memahami perkembangan dan kondisi akuntansi sektor publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena yang kompleks dan kontekstual di bidang akuntansi publik.

Metode Penelitian

- Pendekatan Kualitatif: Metode ini dipilih untuk mendalami aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.
- Studi Literatur: Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel ilmiah terkait akuntansi sektor publik, menggunakan alat bantu typeset.io untuk menyusun kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

- Dinamika Akuntansi Sektor Publik: Jurnal menyatakan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia sangat dinamis, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat.
- Tantangan: Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, dan resistensi terhadap perubahan.
- Reformasi Akuntansi: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun hasil penerapannya bervariasi.

Kesimpulan

Jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, tantangan tetap ada. Kerjasama antara akademisi dan praktis diperlukan untuk menciptakan keselarasan antara konsep dan implementasi akuntansi publik.

Kata Kunci

- Akuntansi
- Sektor Publik
- Kinerja Organisasi
- Studi Literatur

Relevansi

Jurnal ini relevan bagi akademisi, praktisi akuntansi, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada pengelolaan keuangan publik dan perkembangan akuntansi di Indonesia.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji penerapan akuntansi sektor publik dari perspektif budaya dan untuk mengeksplorasi solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fokus dan temuan utama dari jurnal tersebut, serta relevansinya dalam konteks akuntansi sektor publik di Indonesia.

II. JURNAL NASIONAL 2

Nama Jurnal : TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan

Judul Jurnal : LITERATURE REVIEW: ANALISIS PENGENDALIAN
INTERNAL DAN UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis : Rahma Putri Wijayanti, Supanji Setyawan

Halaman : 11 halaman

Tahun Terbit : 2023

Tempat : Universitas Tidar

Link Jurnal : <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334>

Tujuan Penelitian

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal sebagai upaya untuk mencegah kecurangan akuntansi di sektor publik. Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menganalisis 13 artikel relevan yang membahas hubungan antara pengendalian internal dan kecurangan akuntansi.

Temuan Utama

- Efektivitas Pengendalian Internal: Jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi di organisasi sektor publik.
- Komponen Pengendalian Internal: Terdapat lima komponen utama dalam sistem pengendalian internal yang perlu diterapkan untuk mencegah kecurangan, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- Faktor Penyebab Kecurangan: Kecurangan akuntansi sering kali muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dari individu atau kelompok.

Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk mencegah kecurangan akuntansi. Organisasi sektor publik disarankan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan melatih karyawan untuk meminimalkan risiko kecurangan.

Saran

Penulis merekomendasikan agar seluruh organisasi sektor publik meningkatkan pengendalian internal dan menjaga standar tinggi dalam implementasinya. Pelatihan karyawan juga dianggap penting untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal.

Relevansi dan Kontribusi

Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai akuntansi dan pengendalian internal, terutama dalam konteks sektor publik di Indonesia. Temuan ini relevan bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya mencegah kecurangan di sektor publik.

Keterbatasan

Meskipun penelitian ini mendalam, keterbatasan dalam hal cakupan literatur dan metode yang digunakan dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif mungkin diperlukan untuk memperkuat temuan ini. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan akuntansi di sektor publik.

C. JURNAL INTERNASIONAL

I. JURNAL INTERNASIONAL 1

Nama Jurnal :

Judul Jurnal : APPLIED PUBLIC SECTOR ACCOUNTING FOR BROADBAND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WITH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SCHEME: A LITERATURE REVIEW

Penulis : Steelyana W, Evi

Halaman : 17 Halaman

Tahun : Terbit 2021

Tempat : BINUS University Jalan KH Syahdan No.9, Jakarta Barat

Link Jurnal :

https://www.researchgate.net/publication/360549160_APPLIED_PUBLIC_SECTOR_ACCOUNTING_FOR_BROADBAND_INFRASTRUCTURE_DEVELOPMENT_WITH_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP_SCHEME_A_LITERATURE_REVIEW

Judul dan Tujuan Penelitian

Jurnal ini membahas penerapan akuntansi sektor publik dalam pengembangan infrastruktur broadband melalui skema Kemitraan Publik-Swasta (Public Private Partnership/PPP). Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tema utama dalam penelitian akuntansi sektor publik terkait PPP untuk infrastruktur broadband selama 20 tahun terakhir (2000-2020) dan menganalisis kontribusinya terhadap pengembangan infrastruktur broadband.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis. Data yang digunakan diambil dari publikasi jurnal internasional terakreditasi selama periode yang ditentukan. Proses pemilihan artikel dilakukan secara ketat untuk mengurangi bias dan memastikan keandalan hasil.

Temuan Utama

- Tema Utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema utama dalam literatur PPP untuk pengembangan infrastruktur broadband adalah Strategi Kebijakan Publik. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi swasta dan pengembangan infrastruktur.
- Kualitas Jurnal: Sebagian besar artikel yang dianalisis berasal dari jurnal berkualitas tinggi (Q1) dan mencakup tema-tema seperti kebijakan publik, manajemen, dan teknologi.
- Tren Penelitian: Penelitian menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam publikasi mengenai PPP dan infrastruktur broadband, dengan fokus pada strategi kebijakan dan implementasi.

Implikasi

Jurnal ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana PPP dapat digunakan untuk meningkatkan akses broadband, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kebijakan publik yang mendukung pendanaan dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini menekankan bahwa untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur broadband, diperlukan strategi kebijakan yang efektif yang dapat memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi aspek tata kelola dan akuntabilitas dalam konteks PPP untuk infrastruktur broadband.

Penutup

Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang peran PPP dalam pengembangan infrastruktur broadband dan pentingnya strategi kebijakan publik dalam mendorong investasi dan aksesibilitas layanan.

II. JURNAL INTERNASIONAL 2

Nama Jurnal : Amkop Management Accounting Review (AMAR)

Judul Jurnal : Accountability and Transparency in Public Sector Accounting:
A Systematic Review

Penulis : Ratna Sari dan Muslim Muslim

Halaman : 17 Halaman

Tahun : Terbit 2023

Tempat : Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,
90231, Indonesia

Link Jurnal :

https://www.researchgate.net/publication/382847087_Accountability_and_Transparency_in_Public_Sector_Accounting_A_Systematic_Review

Tujuan

Jurnal ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis mekanisme yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik. Fokus penelitian mencakup kerangka regulasi, praktik audit, transformasi digital, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pertimbangan etis.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain tinjauan sistematis dengan mengikuti pedoman PRISMA. Pencarian literatur mencakup artikel jurnal yang telah melalui peer-review, buku, dan laporan resmi dari tahun 2000 hingga 2023. Data dianalisis menggunakan sintesis kualitatif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan celah dalam literatur yang ada.

Temuan Utama

1. Peran Kerangka Regulasi: Standar seperti IPSAS dan GFS sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Adopsi IPSAS dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi di sektor publik.
2. Praktik Audit: Audit eksternal dan internal memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keandalan informasi keuangan. Audit eksternal

membantu mempertahankan kepercayaan publik, sementara audit internal memberikan pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan integritas operasional.

3. Transformasi Digital: Inisiatif e-government seperti pelaporan keuangan online dan portal data terbuka meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi keuangan. Namun, tantangan seperti keamanan data dan literasi digital masih harus diatasi.
4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan, seperti anggaran partisipatif dan konsultasi publik, sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Keterlibatan ini memastikan bahwa laporan keuangan relevan dan responsif terhadap kebutuhan publik.
5. Pertimbangan Etis dan Pencegahan Korupsi: Standar etis yang kuat dan kebijakan anti-korupsi yang komprehensif diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Perlindungan bagi pelapor sangat penting untuk mendorong pelaporan praktik tidak etis.

Kesimpulan

Jurnal ini menekankan pentingnya pendekatan multifaset untuk meningkatkan manajemen keuangan sektor publik. Pembuat kebijakan harus memprioritaskan adopsi standar internasional, berinvestasi dalam infrastruktur digital, dan mendorong perilaku etis melalui pendidikan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi inisiatif dukungan yang disesuaikan dan dampak teknologi baru terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Rekomendasi

- Penerapan Standar Internasional: Negara perlu mengadopsi kerangka dan standar internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Investasi dalam Infrastruktur Digital: Meningkatkan infrastruktur digital untuk mendukung pelaporan keuangan yang transparan.
- Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan program pendidikan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman etis di kalangan pemangku kepentingan. Analisis ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menjembatani celah antara teori dan praktik dalam akuntansi sektor

publik, serta untuk memahami cara-cara baru dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

PEMERINTAHAN ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN UNTUK TAHUN
31 DESEMBER 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	130,404,000.00	144,007,250.00	13,603,250.00	110,43
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130,404,000.00	144,007,250.00	13,603,250.00	110,43
2.	Retribusi Daerah	130,404,000.00	144,007,250.00	13,603,250.00	110,43
2.02.	Retribusi Jasa Usaha	130,404,000.00	144,007,250.00	13,603,250.00	110,43
2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57,500,000.00	28,547,000.00	(28,953,000.00)	49,65
2.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	100,00
2.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50,000,000.00	21,047,000.00	(28,953,000.00)	42,09
2.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	72,904,000.00	115,460,250.00	42,556,250.00	158,37
2.02.11.0004.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	72,904,000.00	115,460,250.00	42,556,250.00	158,37

	JUMLAH PENDAPATAN	130,404,000.00	144,007,250.00	13,603,250.00	110,43
01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	61,671,964,707.00	61,455,598,677.52	(216,366,029.48)	99,65
01.00.00.5.2.	BELANJA OPERASI	61,671,964,707.00	61,455,598,677.52	(216,366,029.48)	99,65
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,704,155,413.00	20,648,073,964.00	(56,081,449.00)	99,73
01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	468,618,511.00	460,174,247.00	(8,444,264.00)	98,20
02.	Belanja Barang dan Jasa	468,618,511.00	460,174,247.00	(8,444,264.00)	98,20
02.01.	Belanja Barang	110,242,511.00	108,362,807.00	(1,879,704.00)	98,29
02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	110,242,511.00	108,362,807.00	(1,879,704.00)	98,29
02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,123,931.00	5,123,931.00	0.00	100,00
02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,744,160.00	1,744,160.00	0.00	100,00
02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	33,134,212.00	31,942,000.00	(1,192,212.00)	96,40
02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100,00
02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37,185,208.00	36,742,216.00	(442,992.00)	98,81
02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15,400,000.00	15,400,000.00	0.00	100,00
02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	100,00
02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,905,000.00	7,660,500.00	(244,500.00)	96,91
02.02.	Belanja Jasa	304,586,000.00	299,736,000.00	(4,850,000.00)	98,41

02.02.	Belanja Jasa	304,586,000.00	299,736,000.00	(4,850,000.00)	98,41
02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	198,050,000.00	193,200,000.00	(4,850,000.00)	97,55
02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,100,000.00	8,650,000.00	(2,450,000.00)	77,93
02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	100,00
02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	129,800,000.00	127,400,000.00	(2,400,000.00)	98,15
02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54,500,000.00	54,500,000.00	0.00	100,00
02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	106,536,000.00	106,536,000.00	0.00	100,00
02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	106,536,000.00	106,536,000.00	0.00	100,00
02.04.	Belana Perjalanan Dinas	53,790,000.00	52,075,440.00	(1,714,560.00)	96,81
02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53,790,000.00	52,075,440.00	(1,714,560.00)	96,81

Berikut link laporan keuangan dari pemerintah Aceh :

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKBVDwvSZpFwIAyAvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765356273/RO=10/RU=https%3a%2f%2fperindag.acehprov.go.id%2fmedia%2f2024.05%2flra_31_des_2023_cetak_tanggal_09_januari_20241.pdf/RK=2/RS=0fF_gOqFoJPsjhs_JgYyFn0UZqw-